

## **PENDEKATAN INKLUSIF DAN DELIBERATIF DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN**

*RB. Suharta*

### **Abstrak**

*Penelitian mengenai Implementasi Pendekatan Inklusif Dan Deliberatif Dalam Perencanaan Pendidikan Kecakapan Hidup Dan Pemberdayaan Untuk Kelompok Masyarakat Miskin bertujuan untuk mengetahui apakah pendekatan inklusif dan deliberatif menghasilkan berbagai informasi yang dapat direkomendasikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perencanaan program pemberdayaan masyarakat miskin.*

*Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei terhadap kelompok masyarakat miskin yang sedang merancang program atau sedang dan telah melaksanakan program pendidikan kecakapan hidup atau program pemberdayaan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah penggunaan metode dan teknik inklusif dan deliberatif dalam perencanaan program pendidikan kecakapan hidup dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat miskin. Metode pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap data kuantitatif, sedangkan analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang diolah dan disajikan secara kualitatif melalui penyajian kategorik dan komparatif.*

*Hasil penelitian menunjukkan, terdapat 3 (tiga) program kecakapan hidup yang telah dilaksanakan yaitu: (1) kerajinan handycraft oleh PKBM Mlati di Kecamatan Umbulharjo, (2) pendidikan kejuruan prosesing 3 oleh Dinaskertrans Kabupaten Bantul di Kecamatan Jetis, dan (3) pendidikan ketrampilan pertukangan kayu oleh PKBM Candirejo di Kecamatan Jetis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses deliberasi dan inklusi sudah mulai diterapkan dan dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat yang berdampak pada hasil program. Proses perencanaan yang melibatkan masyarakat yang dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas masyarakat baik secara individual ataupun institusional menjadi sesuatu yang penting untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin.*

*Kata kunci: Implementasi, Inklusif, Deliberatif, Kecakapan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat Miskin*

---

*\*) Penulis Dosen PLS FIP UNY*

## **Pendahuluan**

Berdasarkan data pada tahun 2003 penduduk miskin mencapai angka 37,3 juta jiwa atau 17,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum krisis 1996 yang mencapai 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Anomim, 2004).

Masih banyaknya warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menuntut berbagai upaya yang memberikan akses untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu upaya itu adalah menyediakan program pemberdayaan yang memberikan keterampilan bekal hidup (*life skill*) dalam kehidupan pribadi, sosial maupun ekonomi. Menurut Sumarno (2002) kecakapan hidup dapat dikelompokkan menjadi kecakapan yang bersifat umum dan kecakapan yang bersifat khusus.

Pemberian keterampilan sebagai bekal hidup (*life skill*) yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin telah banyak dilakukan baik oleh organisasi pemerintah maupun swasta. Beberapa kajian menunjukkan bahwa berbagai upaya itu masih belum mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal, antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian para perencana program pemberdayaan masyarakat dalam memahami karakteristik masyarakat miskin secara utuh dan komprehensif. Kajian lain menyatakan bahwa kurangnya keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh perencanaan program pemberdayaan masyarakat kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Masyarakat miskin kurang diberi ruang kebebasan dalam menyampaikan usul, pendapat, maupun masukan.

Menurut Sudjana (2001) program pembelajaran kecakapan hidup bagi masyarakat miskin harus mengacu pada dua hal yaitu *pertama*, memusatkan pada masyarakat agar memiliki aspirasi terhadap pekerjaan atau usaha yang sederhana sesuai dengan sumber-sumber yang mendukung lapangan kerja atau usaha tingkat dasar yang sederhana pula; dan *kedua*, membantu meningkatkan taraf hidup dan penghidupannya sehingga mereka mengenali berbagai makna dan pilihan baru dalam kehidupannya

Program-program pemberdayaan masyarakat sering datang dari atas, dari birokrat, pemilik proyek atau penyandang dana. Masyarakat penerima program kurang, bahkan sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut perbaikan kualitas kehidupannya.

Konsekuensi yang terjadi kemudian adalah banyaknya program-program pemberdayaan masyarakat yang gugur di tengah jalan, tidak berhasil, dan tidak mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

Pendekatan Inklusif dan Deliberatif dalam perencanaan program pendidikan kecakapan hidup dan pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas. Pendekatan Inklusif dimaksudkan sebagai pelibatan berbagai kelompok sosial dalam proses pengambilan keputusan dan biasanya menekankan keterlibatan kelompok yang terabaikan atau termarginalkan oleh kekuatan sosial ekonomi yang ada. Sedangkan pendekatan Deliberatif didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang didahului dengan diskusi tentang alasan dukungan atau penentangan terhadap sesuatu pandangan. Proses deliberatif mengasumsikan adanya

*Pendekatan Inklusif dan Deliberatif* .....(RB. Suharta) 67  
pandangan yang berbeda dan masing-masing pandangan harus dihargai.

Dari uraian di atas bahwa perencanaan program pendidikan kecakapan hidup dan pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sepanjang proses perencanaannya melalui pendekatan Inklusif dan Deliberatif. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendekatan Inklusif dan Deliberatif dalam proses perencanaan program pendidikan kecakapan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Keadaan yang menunjukkan fenomena kemiskinan menurut *World Summit for Social Development* (1995) yang dikutip Sadjji (2004) dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal masyarakat sendiri. Faktor internal yang menyebabkan kemiskinan meliputi rendahnya pendidikan, rendahnya posisi tawar, budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan, dan rendahnya kemampuan orang miskin mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. Sedangkan faktor eksternal dari orang miskin adalah rendahnya akses terhadap sumberdaya dasar (pendidikan dasar, kesehatan, air bersih) atau berada di daerah terpencil, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat misalnya karena sistem yang kurang mendukung, konflik sosial dan politik, bencana alam dan kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemecahan masalah kemiskinan dapat didekati dari tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi kultural, struktural, dan sistem (Alfian: 1980; Sadjji: 2004). Pertama, *dimensi kultural* menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan begitu mendalam dan kronis sifatnya, dimana kondisi kemiskinan diterima oleh masyarakat dengan pasrah,

menganggap sudah nasib, sudah menjadi suratan takdir. Dengan perkataan lain, kemiskinan ini disebabkan karena adanya rintangan-rintangan mental yang akibatnya masyarakat memiliki kultur kemelaratan (*the culture of proverty*).

Kedua, *dimensi struktural* dapat dipahami bahwa kondisi kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat disebabkan oleh struktur masyarakat itu sendiri. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat perbedaan tajam antara kelompok yang kaya dengan kelompok miskin, dimana segolongan kecil masyarakat yang kaya menguasai berbagai segi kehidupan masyarakat dan mempertahankan struktur sosial yang berlaku sehingga tidak terjadi proses mobilisasi sosial.

Dimensi ketiga, yaitu *dimensi sistem* menunjukkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat ada kelompok-kelompok yang menguasai berbagai segi kehidupan. Kelompok-kelompok tersebut mengontrol dan menguasai segi-segi kehidupan kelompok lain, bersifat status quo, dan meneruskan atau melanggengkan posisi dalam waktu yang lama.

Ada berbagai program dalam penanggulangan kemiskinan di antaranya Asian Development Bank (ADB) melalui rumusan *Millenium Development Goals (MDG)* mengenalkan tiga strategi penanggulangan kemiskinan untuk kawasan Asia Pasifik yaitu *Pro-Poor Sustainability Economic Growth, Good Governance*, dan *Social Development* masing-masing dengan tiga rentang waktu intervensi yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam ketiga pilar strategi tersebut terdapat sejumlah intervensi yaitu pembangunan sektor swasta, kerjasama regional, sektor

*Pendekatan Inklusif dan Deliberatif* .....(RB. Suharta) 69  
 pertanian dan pembangunan pedesaan, manajemen lingkungan dan sumberdaya alam, transportasi, komunikasi, energi, dan keuangan masuk pada pilar strategi pertama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang *pro-poor*; manajemen dan administrasi pengeluaran masyarakat, desentralisasi/devolusi, partisipasi pihak-pihak pemangku kepentingan, dan proteksi sosial masuk pada pilar kedua *Good Governance*. Kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan perkotaan termasuk pada pilar strategi ketiga: pembangunan sosial. Matriks 1 di bawah ini menjelaskan program penanggulangan kemiskinan dalam konteks MDG.

**Matrik 1 Program Penanggulangan Kemiskinan**

Pilar Strategis	Intervensi		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
<i>Pro-Poor, sustainability Economic Growth</i>		Pembangunan Sektor Swasta	
		Kerjasama Regional	
		Sektor Pertanian dan Pembangunan Perdesaan	
		Manajemen Lingkungan dan Sumberdaya Alam	
		Transportasi, Komunikasi, Energi dan Keuangan	
<i>Good Governance</i>		Manajemen dan administrasi Pengeluaran Masyarakat	
		Desentralisasi/Devolusi	
		Partisipasi Stakeholders	
		Proteksi Sosial	
Social Development		Kesehatan dan Pendidikan	
		Peningkatan Penyediaan Air Bersih dan Perkotaan	

Sumber: ADB Report, 2000

Dalam konteks Indonesia, program penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan disajikan dalam Matriks 2 berikut ini yang di dalamnya berisi indikator kinerja upaya penanggulangan kemiskinan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta yang masing-masing diwakili oleh satu kecamatan yang ditetapkan secara purposif atas dasar tingkat keparahan yang dialami cukup tinggi, akibat bencana gempa bumi 27 Mei 2006 yang lalu. Kecamatan yang mewakili adalah Jetis untuk Kabupaten Bantul dan Umbulharjo untuk Kota Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan metode survei, dimana unit analisisnya adalah kelompok masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan yang sedang merancang program atau sedang dan telah melaksanakan program pendidikan kecakapan hidup atau program pemberdayaan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah penggunaan metode dan teknik inklusif dan deliberatif dalam perencanaan program pendidikan kecakapan hidup dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan perencanaan pendidikan kecakapan hidup atau pemberdayaan masyarakat yang ada di lokasi penelitian. Wawancara dengan teknik terstruktur akan dilakukan pada kelompok warga masyarakat (*focus-group*) miskin desa dan kota, fasilitator, dan pihak terkait lain. Dokumentasi digunakan untuk mencari informasi berupa penelusuran

*Pendekatan Inklusif dan Deliberatif* .....(RB. Suharta) 71  
dokumen seperti buku laporan, publikasi dan pengumuman.  
Instrumen penelitian yang digunakan berupa panduan observasi,  
panduan wawancara, dan panduan analisis isi.

**Hasil Penelitiandan Pembahasan**

Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2004 adalah 806.539 jiwa, tersebar di 17 kecamatan. Penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 390,534 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 406,329 jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul dapat dikatakan tidak merata, daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di Kecamatan Sewon (1.016/km<sup>2</sup>), Banguntapan (1.014/km<sup>2</sup>), dan Bantul (1.016/km<sup>2</sup>), sedangkan kepadatan penduduk geografis rendah terletak di Srandakan (1.002/km<sup>2</sup>), Sanden (1.004/km<sup>2</sup>), dan Pundong (1.005/km<sup>2</sup>).

Tabel 1 Jumlah Penduduk menurut Lapangan Pekerjaan  
Utama Tahun 2004

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2004
1.	Pertanian	25.56
2.	Pertambangan dan penggalian	1.98
3.	Industri	18.95
4.	Listrik, gas dan air	0.07
5.	Konstruksi	8.88
6.	Perdagangan	21.16
7.	Komunikasi/transportasi	4.64
8.	Keuangan	1.61
9.	Jasa	16.89
10	Lainnya	0.27
	Jumlah	100.00

*Sumber: BPS Kab.Bantul dalam Bantul.go.id*



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang dengan persentase mencapai 46,72% dari jumlah penduduk, kemudian disusul penduduk yang bekerja dalam bidang industri sebesar 18,95% dan bidang jasa sebesar 16,89%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Bantul masih menggantungkan kehidupannya pada kondisi alam terutama bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian.

Perkembangan pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 selalu bervariasi. Pada tahun 2004 realisasi PAD mencapai Rp 30.777.820.174,83 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 32.882.358.490,40. Akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya antara tahun 2000-2003 jumlah ini mengalami peningkatan cukup besar.

Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita. Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir (tahun 2000 dan 2004), baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan tahun 1993.

Dengan membandingkan PDRB dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dapat diketahui besarnya perkembangan pendapatan PDRB per-kapita. Pada dua tahun terakhir pertumbuhan PDRB per-kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan dari - 3.50% pada tahun 1999 menjadi 4,96% pada tahun 2004.

PDRB per-kapita berdasarkan harga berlaku pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 3.795.170,- meningkat menjadi Rp 4.412.104,- pada tahun 2004. Pertumbuhan PDRB per-kapita ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas produksi masyarakat Kabupaten Bantul. Pertumbuhan PDRB per-kapita tahun 2004 sebesar 16,26% ini merupakan salah satu indikator bahwa tingkat produktivitas penduduk Kabupaten Bantul semakin tinggi. Selanjutnya pertumbuhan PDRB per-kapita selama lima tahun terakhir berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,242%. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa aktivitas produksi penduduk Kabupaten Bantul semakin bergairah yang selanjutnya diharapkan berimplikasi pada perbaikan kesejahteraan rakyat.

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya, yaitu 32,5 Km<sup>2</sup> yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa (data per Desember 1999) dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/Km<sup>2</sup>

Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan).

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata

15.197/km<sup>2</sup>. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun. Selama kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 perkembangan keluarga miskin cukup fluktuatif. Walaupun di Kabupaten Bantul keluarga/penduduk miskin masih relatif cukup tinggi, dari tahun ke tahun tetap mengalami penurunan yang cukup berarti.

Berdasarkan tingkat kemiskinan tahun-tahun sebelumnya serta dengan memperhitungkan tingkat inflasi dan perkiraan pendapatan riil penduduk, diperoleh garis batas kemiskinan secara ekonomi sebesar Rp113.536 (tahun 2004). Dengan garis batas ini, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bantul pada tahun 2004 adalah sebanyak 100.997 orang atau sebanyak 29.306 KK dari jumlah penduduk sebanyak 796.821 orang. Jumlah ini jauh lebih menurun dibandingkan dengan jumlah KK miskin tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003.

Dari uji survey terhadap lima klaster di lima kecamatan, menunjukkan hasil penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten Bantul yang ada, yaitu turun sekitar 39,65%. Akan tetapi dengan adanya gempa 27 Mei 2006 yang lalu angka kemiskinan tersebut telah meningkat lebih kurang 100%; ribuan keluarga semula memiliki rumah, dalam sekejap tidak memiliki rumah lagi. Untuk keluarga perajin, biasanya rumah tinggal sekaligus sebagai rumah tempat usaha; oleh karena itu hancurnya rumah berarti juga hancurnya usaha keluarga.

Jumlah keluarga miskin dan jumlah jiwa keluarga miskin ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Jumlah Keluarga Miskin

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Jiwa Keluarga Miskin			
		Miskin	Miskin Sekali	Jumlah	Jumlah Jiwa
1	Kretek	1.043	0	1.043	2.84
2	Sanden	1.020	17	1.037	3.183
3	Srandakan	913	72	985	3.243
4	Pandak	1.658	0	1.658	6.012
5	Bb. Lipuro	1.189	11	1.200	3.959
6	Pundong	590	158	748	3.460
7	Imogiri	3.658	474	4.132	14.383
8	Dlingo	1.860	230	2.090	3.922
9	Jetis	1.769	195	1.964	3.518
10	Bantul	1.204	38	1.242	3.970
11	Pajangan	769	0	769	2.560
12	Sedayu	1.278	0	1.278	4.741
13	Kasih	1.785	62	1.847	6.889
14	Sewon	2.041	197	2.238	8.34
15	Piyungan	2.295	205	2.500	7.733
16	Pleret	1.969	204	2.173	7.342
17	Banguntapan	2.338	64	2.402	8.756
	Jumlah	27.379	1.927	29.306	94.997

Sumber: Badan Kesejahteraan Keluarga Kab. Bantul dalam Bantul.go.id

Karakteristik keluarga miskin di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi kurangnya SDM sebagai sarana mencari nafkah, sehingga pilihan pekerjaan bagi mereka sangat terbatas, demikian juga dengan upah yang diperolehnya. Beban tanggungan kerluarga tidak seimbang dengan pendapatan riil yang diperolehnya, sehingga mereka

hidup dengan standar makan, sandang dan papan yang tidak memadai. Keluarga miskin di Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan absolut dan merupakan keluarga yang potensial menciptakan masalah rumah tidak layak huni, generasi anak terlantar, anak nakal dan anak jalanan, apabila tidak mendapatkan bimbingan yang memadai.

Keluarga miskin merupakan permasalahan kesejahteraan sosial yang paling banyak di Kota Yogyakarta, yakni sebanyak 23 kasus. Keluarga miskin banyak dijumpai di wilayah sepanjang tepian sungai Code, Winongo, dan Gajahwong.

Tabel 3 Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta.

No	Kecamatan	Keluarga Miskin	Jumlah Penduduk
1	Gedongtengen	1.262	26.423
2	Gondokusuman	2.349	75.091
3	Danurejan	1.462	31.436
4	Jetis	1.836	37.839
5	Tegalrejo	2.739	41.158
6	Pakualaman	723	14.939
7	Ngampilan	1.016	23.562
8	Wirobrajan	1.490	31.062
9	Mantrijeron	1.749	40.665
10	Kraton	1.010	29.737
11	Gondomanan	1.069	17.730
12	Mergangsan	1.860	42.211
13	Kotagede	1.812	31.681
14	Umbulharjo	3.076	72.762
	Jumlah	23.453	516.296

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Umbulharjo adalah kecamatan dengan jumlah keluarga miskin terbesar dengan

*Pendekatan Inklusif dan Deliberatif* .....(RB. Suharta)77  
jumlah 3.076 keluarga. Kondisi ini harus segera diatasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan berbagai program pemberdayaan keluarga miskin atau dengan program *life skills* agar masyarakat dapat terlepas dari belenggu kemiskinan.

Untuk mengatasi kondisi kemiskinan baik di kota Yogyakarta maupun di Bantul dilakukan melalui program:

#### 1. Kerajinan *Handycraf*

Program pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan adalah kerajinan *handycraft* yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati yang berlokasi di Nitikan, Kalurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Program kecakapan hidup yang berupa keterampilan *handycraft* yang dilaksanakan oleh PKBM ini dilatarbelakangi oleh dampak terjadinya gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 lalu. Oleh karena itu, maka PKBM Melati bekerja sama dengan Subdin Pendidikan Non Formal (PNF) Kota Yogyakarta menyelenggarakan kursus keterampilan *handycraft* melalui program Dana Bantuan Khusus (DBK) Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*), dengan harapan setelah selesai kursus para peserta yang berasal dari warga masyarakat sendiri dapat berwirausaha secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakat yang terpuruk akibat terjadinya gempa bumi.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap warga masyarakat di bidang pekerjaan atau usaha tertentu sesuai bakat dan minat, perkembangan fisik, dan jiwanya serta potensi lingkungan sekitar sehingga warga masyarakat memiliki bekal kemampuan

keterampilan untuk bekerja dan berusaha mandiri yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Tujuan khusus paorgram ini adalah: (1) memberikan bekal keterampilan, pengetahuan, dan sikap mandiri pada warga belajar untuk berani berwirausaha, (2) meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan warga belajar, (3) memberikan pendidikan sepanjang hayat yang bermanfaat kepada warga belajar, (4) menciptakan lapangan kerja baru melalui usaha *handicraft*, dan (5) memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi.

## 2. Program Pendidikan Kejuruan *Prossesing 3*

Program ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul di Desa Canden, Kecamatan Jetis. Program kecakapan hidup yang dilaksanakan adalah “*Kejuruan Prossesing 3*” bertujuan untuk memberikan ketrampilan dan pengetahuan kepada masyarakat korban gempa agar dapat berwirausaha. Ketrampilan yang diberikan disesuaikan dengan minat dari warga masyarakat desa Canden Jetis dan potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di sekitarnya. Setelah mengikuti pelatihan kejuruan *Prossesing 3* diharapkan warga belajar dapat memiliki bekal ketrampilan pembuatan berbagai macam resep makanan, berwirausaha sendiri misalnya membuka katering, meningkatkan penghasilan keluarga sehingga kesejahteraan hidup semakin meningkat, dapat menciptakan lapangan kerja baru, memiliki sikap/jiwa mandiri untuk bekerja dan berusaha.

## 3. Program Keterampilan Pertukangan Kayu

Kegiatan lain yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jetis adalah program keterampilan pertukangan kayu yang

diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) Candirejo, Dusun Suren Kulon, Desa Canden, Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. Tujuan program pelatihan pertukangan kayu ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap masyarakat korban gempa agar segera mampu bangkit kembali setiap kerusakan akibat gempa dan kembali bekerja sesuai dengan mata pencaharian semula seperti sebelum terjadinya gempa bumi dengan memberikan bantuan stimulant sebagai modal usaha.

#### 4. Program Pemberdayaan Masyarakat

##### 1). Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) diselenggarakan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Kota Yogyakarta di Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah: *Pertama*, terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunana berkelanjutan, yang aspiratif,



representatif, megakar. Lembaga masyarakat yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada di wilayahnya.

*Kedua*, meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM), mengedepankan peran pemerintah Kota/Kabupaten agar mereka semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin perkotaan, baik melalui pengokoham Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

## 2). Program Kelompok Wanita Tani Sari Kismo

Program Kelompok Wanita Tani Sari Kismo diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Kehewanan Kota Yogyakarta di lokasi Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Tujuan dari program “Kelompok Wanita Tani Sari Kismo” Kelurahan Warungboto ini antara lain: memenuhi kebutuhan gizi mikro keluarga secara berkesinambungan melalui pemanfaatan pekarangan, meningkatkan keterampilan keluarga tani dalam budidaya tanaman, ternak dan ikan, sekaligus pengolahannya dengan teknologi

*Pendekatan Inklusif dan Deliberatif* .....(RB. Suharta) 81  
yang tepat, serta meningkatkan pendapatan keluarga tani Kelurahan Warungboto.

Sasaran program ini adalah berkembangnya kemampuan wanita tani dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi khususnya wanita tani di Kelurahan Warungboto. Dan yang ketiga adalah Program Pengembangan Hortikultura. Program pengembangan hortikultura diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bantul di Dusun Bayuran, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Yang menjadi sasaran program adalah kelompok tani Hortikultura di Kelurahan Sumberagung.

Tujuan dari dilaksanakannya program pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat korban gempa agar segera mampu bangkit kembali setelah kerusakan akibat gempa dan kembali bekerja sesuai dengan mata pencaharian mereka seperti sebelum terjadinya gempa bumi dengan memberikan bantuan stimulant sebagai modal usaha.

Ragam program yang dipakai sebagai sampel menunjukkan bahwa pendidikan *life skills* tidak hanya dikerjakan oleh jajaran Depdiknas atau Dinas Pendidikan, atau unit-unit terkait misalnya PKBM, akan tetapi juga dikerjakan oleh unit-unit dibawah asuhan atau fasilitasi departemen lain misalnya Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Dinas Pertanian dan Kehewanan, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Pekerjaan Umum).

Relevansi program sangat tinggi karena pada umumnya bersifat responsif langsung terhadap kebutuhan yang muncul sebagai akibat langsung dari bencana gempabumi. Manfaat nyata juga sangat potensial dihasilkan oleh masing-masing program. Penderitaan fisik-

psikis, sosial-ekonomis, dengan semangat bangkit kembali dari keterpurukan telah melahirkan berbagai kegiatan oleh berbagai instansi dengan berbagai bentuk fasilitasi.

Mengenai bentuk fasilitasi tersebut meliputi: a) PKBM menyelenggarakan: (1) Pelatihan *handycraft* (PKBM Melati, Sorosutan, Kota Yogya) dan (2) Pertukangan kayu (PKBM Candirejo, Canden, Jetis Bantul); b) Dinas Kimraswil menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan atau P2KP; c) Dinas pertanian menyelenggarakan pengembangan hortikultura di Bayuran, Desa Sumberagung, Kec. Jetis, Kab Bantul ; d) Dinas pertanian dan kehewanan memfasilitasi Kelompok Tani Sari Wismo di Desa Warungboto, Kec Umbulharjo Kota Yogyakarta; (e) Dinas Nakertrans menyelenggarakan pelatihan pembuatan makanan dari bahan lokal; dan kegiatan ini disebut Pendidikan Kejuruan *Prosesing 3*.

Bangkitnya kembali masyarakat Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul beberapa bulan setelah terjadinya gempa bumi menandakan betapa kuatnya "ketahanan" masyarakat dalam menerima bencana yang bisa jadi itu adalah ujian, cobaan, peringatan dan "hukuman" terhadap ulah manusia sendiri. Besarnya perhatian dan bantuan dari pemerintah, dunia usaha, warga masyarakat, dan juga dari negara-negara lain kurang berarti manakala masyarakat sendiri masih larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Bangkitnya masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat baik secara fisik dan maupun kejiwaan.

Orientasi pemberdayaan juga sangat kuat pada masing-masing program kegiatan. Meskipun manfaat nyata dan langsung memang harus dihasilkan karena mendesaknya kebutuhan untuk segera keluar

*Pendekatan Inklusif dan Deliberatif .....(RB. Suharta) 83*  
dari kesusahan karena bencana alam. Akan tetapi nampak ada kesadaran untuk tidak terjebak hanya pada jenis kegiatan yang hanya bermanfaat sesaat, cepat hilang; dan menumbuhkan kebergantungan; kegiatan yang demikian diberlakukan hanya pada fase penyelamatan (*rescuing*) dalam bentuk pemberian makanan/ minuman siap untuk dikonsumsi. Sesudah fase penyelamatan, memasuki fase penyembuhan (*recovery*); agar tidak terjadi kebergantungan berbagai bentuk bantuan diarahkan agar masyarakat diharapkan dapat mandiri (*self-reliant*).

### **Kesimpulan dan Saran**

Prinsip deliberasi dan inklusi sudah mulai diterapkan; dengan intensitas dan efektifitas yang berbeda-beda. Pada masyarakat dengan kapasitas dan wawasan cukup, apabila mendapatkan kesempatan untuk berperanserta aktif semenjak fase perencanaan, tentu saja akan memungkinkan hasil yang lebih baik. Tetapi, meski diberi kesempatan berperanserta aktif, kalau kapasitas masyarakat masih di bawah ambang batas minimal yang dibutuhkan untuk berperanserta secara efektif; hasilnya pun akan kurang optimal.

Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan, ditingkatkan kapasitasnya, baik secara individual maupun institusional; sehingga memungkinkan terjadinya deliberasi dan inklusi yang efektif. Pengelola program dituntut pandai mengidentifikasi ambang kapasitas yang diperlukan untuk bentuk partisipasi tertentu; dan mempersiapkan masyarakat dengan kapasitas tersebut dengan cara yang tepat. Misalnya pada fase *needs assessment* diperlukan upaya *rekonaisan*

atau penyadaran masalah; baru setelah itu dapat diajakserta merencanakan kegiatan dari masyarakat untuk masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim, 2004, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesra.
- Mantra, Ida Bagoes, (2004) *Filasafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadji Partoatmojo, (2004), *Masalah Kemiskinan dan Kompleksitas Penanggulangannya*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bid. Kesra
- Sudjana, D (2002), *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, Makalah disampaikan pada Rakor Persiapan dan Penyelenggaraan Backstoping PKBM, November 2002 di Solo.
- Sumarno, 2002, *Kosep Dasar Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)*, *Dinamika Pendidikan* No. 02/th. IX November 2002, FIP UNY Yogyakarta